

Pendampingan Digitalisasi BUMDes Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Desa Hangalande, Kabupaten Ende

Lambertus Langga¹, Hyronimus Se^{2*}

^{1, 2}*Fakultas Ekonomi Universitas Flores*

Jl. Sam Ratulangi No. 10 Kelurahan Paupire, Ende Flores, Nusa Tenggara Timur

*Korespondensi: ironimusodja@gmail.com

Abstrak

Tujuan dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah 1) Untuk mengetahui sejauh mana berjalannya program digitalisasi BUMDes Desa Hangalande, 2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya program digitalisasi BUMDes, dan 3) untuk mengetahui upaya-upaya dalam menghadapi faktor tersebut. Metode pelaksanaan kegiatan diawali dengan pendampingan, penyuluhan dan cerama. Hasil dari kegiatan pengabdian adalah berubahnya perilaku masyarakat dan meningkatnya kesadaran dalam mengakses informasi sebagai salah satu modal dalam meningkatkan sumberdaya manusia. Peserta yang adalah Masyarakat sangat antusias dengan kegiatan digitalisasi BUMDes yang selama ini belum dilakukan baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten Ende.

Kata kunci: Pendampingan, Digitalisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia.

Abstract

The objectives of carrying out this community service activity are 1) to find out how far the Hangalande Village BUMDes digitalization program is progressing, 2) to find out the factors that influence the running of the BUMDes digitalization program, and 3) to find out the efforts to deal with these factors. The method of implementing activities begins with mentoring, counseling and lectures. The results of service activities are changes in people's behavior and increased awareness in accessing information as a capital in increasing human resources. Participants who are members of the public are very enthusiastic about the BUMDes digitalization activities which have not been carried out by either the village government or the Ende Regency government.

Keywords: Assistance, Digitalization, Quality of Human Resources.

Submit: Oktober 2023

Diterima: November 2023

Publis: Mei 2024



Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)

1. Pendahuluan

Seiring dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Ende yakni membangun dari desa ke kota karena itu tidak sedikit tantangan yang dialami desa dalam upaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Sebagian besar wilayah desa di Indonesia masih berkebutakan dalam permasalahan kemiskinan, gisi memburuk, ketertinggalan ekonomi dan teknologi informasi, sulitnya infrastruktur yang menghambat proses pendistribusian barang dari desa menuju kota, dan terjadinya diskriminasi terkait pertumbuhan dan perkembangan pedesaan. Pemerintah tingkat desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan level paling bawah dituntut melakukan pemberdayaan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah desanya (Indah, 2023). Sejalan dengan program yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia sehingga implementasi dari hak tersebut diambil tindakan dengan membentuk Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lembaga setingkat Menteri yang spesifik membidangi desa, hingga menyalurkan dana desa dalam rangka mendukung perekonomian desa, sehingga besar harapan desa yang mandiri dan sejahtera dapat terwujud. Menurut Rivaldi (2021) mengemukakan pendampingan desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa. Pendampingan Masyarakat des ini dilaksanakan agar adanya pemerataan Pembangunan dan percepatan Pembangunan di desa dapat tercapai dengan cepat. Sehingga fasilitas pemerintah desa, Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa perlu dilakukan untuk mendorong penggunaan

dana desa. Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah dengan memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi tingkat desa, salah satunya adalah dengan mengelola badan Usaha Milik Desa. Pengelolaan BUMDes dapat melibatkan masyarakat sehingga dapat mengurangi pengangguran dan desa semakin maju dan mandiri. BUMDes mengikuti era digitalisasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sejak tahun 2021 Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi (KemendesPDTT), program digitalisasi desa menjadi program prioritas pemerintah Indonesia.

Permasalahan yang sedang dihadapi Desa Hangalade Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende yaitu pengumpulan data, penanganan administrasi, distribusi masih manual dan kurangnya kerjasama dari pihak terkait sehingga kesejahteraan penduduk desa belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Digitalisasi dimaksudkan bagi proses pelaksanaan BUMDes adalah pendataan, administrasi, distribusi dan kolaborasi. Pendataan BUMDes pada aplikasi yang dimaksud adalah BUMDes identitas yang meliputi nama, alamat, peraturan desa sebagai dasar hukum untuk pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Standard Operating Procedure (SOP), laporan keuangan terakhir, alamat email, media sosial digunakan, nama admin, dan unit bisnis.

Pemerintah Desa Hangalade merupakan salah satu desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sumber potensi desa yang dapat dikembangkan antara lain kopi dan kemiri, namun karena sumber daya manusia yang dimiliki Desa Hangalade masih sangat rendah maka pengelolaan BUMDes sebagai badan usaha desa belum di kelola secara maksimal. Dengan potensi

desa dan pembentukan BUMDes bersama dengan desa tetangga dapat dilakukan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Jalan berpasir menjadi kendala pada pendistribusian hasil usaha. Diharapkan distribusi dilakukan BUMDes pemasaran sebanyak mungkin. Pelaksanaan distribusi Desa Hangalade dalam kaitannya dengan pendistribusian hasil kegiatan usaha hingga kini BUMDes masih dilakukan secara manual di mana era digital saat ini perlu ada inovasi baru dalam pemasaran atau juga dikenal sebagai digital marketing.

Berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat, beberapa kegiatan pendampingan yang dilaksanakan pada saat kegiatan pengabdian yaitu pendataan BUMDes, administrasi BUMDes, distribusi BUMDes, dan kolaborasi BUMDes. Administrasi BUMDes berkaitan dengan proses kegiatan yang mencakup merekam, mengklasifikasikan dan meringkas semua kegiatan BUMDes secara sistematis disajikan dalam bentuk laporan BUMDes. Laporan itu kemudian digunakan sebagai bahan untuk dianalisis dan hasil analisis membentuk dasar untuk membuat keputusan bisnis BUMDes. Jenis-jenis buku BUMDes Administrasi sebagai berikut: a) Buku Daftar Pengelola BUMDes, b) Buku Notulen Rapat BUMDes, c) Buku Agenda Surat Masuk, d) Buku Agenda Surat Keluar, e) Buku Rencana Kegiatan BUMDes, f) Buku Kas Harian BUMDes, g) Buku Pinjaman, h) Buku Insentif, i) dan Buku Laporan BUMDes.

Program digital marketing memfasilitasi pengusaha memantau dan menyediakan kebutuhan dan keinginan konsumen, melalui dunia virtual konsumen atau pelanggan dapat menemukan dan mendapatkan informasi produk dengan lebih mudah. Digitalisasi pemasaran melalui pemanfaatan teknologi

untuk diterapkan pada pengembangan badan usaha skala mikro yang terletak di daerah pedesaan seperti usaha milik desa (BUMDes).

Berdasarkan hasil observasi bahwa, sebagian besar masyarakat di Desa Hangalade Kecamatan Kotabaru Kab. Ende dalam Pengembangan BUMDes membutuhkan 2 (dua) dasar utama, yaitu lembaga dan bisnis. BUMDes yang memiliki legalitas hukum didorong untuk menetapkan potensi unit bisnis berbasis desa. Melalui bisnis yang cocok dengan desa potensial menjadi penggerak ekonomi di tingkat perdesaan. Untuk mengoptimalkan kebijakan dengan akses keuangan tersedia di BUMDes dan memfasilitasi akses ke pasar dengan platform digital dapat memudahkan hasil usaha BUMDes. Dasar utama yang dibutuhkan dalam pengembangan BUMDes, digitalisasi pemasaran dan keuangan untuk BUMDes sangat mendesak untuk dilakukan mengingat BUMDes memiliki peran yang sangat strategis bagi roda perekonomian di desa itu sendiri.

Salah satu bentuk BUMDes ilustrasi bekerja sama dengan petani, misalnya dapat menampung kelompok produk pertanian dan membantu dalam distribusi produksi pertanian. Apabila BUMDes mengalami kekurangan dana dapat maka BUMDes dapat mengandalkan koperasi dan LPD sebagai pendukung. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melibatkan dosen dan mahasiswa dengan tujuan memberdayakan dan pendampingan masyarakat melalui penerapan pengetahuan dan teknologi. Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan masyarakat sebagai peserta dan mahasiswa mendapat pengalaman dan pengetahuan secara teknis sehingga mampu mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah Pembangunan.

2. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pendampingan diawali kegiatan penyuluhan disesuaikan dengan materi dan tujuan dari setiap pelaksanaan program agar bisa diketahui siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut dan apa yang harus dilakukan agar kebijakan tersebut terlaksana dengan baik sesuai target dan harapan. Metode yang digunakan pada saat kegiatan yaitu ceramah, metode ini digunakan saat menyampaikan materi dalam bentuk tertulis.

Pada pelaksanaan penyuluhan metode ini digunakan pada saat awal kegiatan, dan metode diskusi, penggunaan metode ini membutuhkan partisipasi Masyarakat untuk saling bertukar informasi secara lisan. Masyarakat sangat antusias dan mendengar penyampaian materi sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan sehingga menjadi bahan diskusi. Diskusi terjadi dengan muncul ide dan gagasan yang menjadi fokus untuk kegiatan pendampingan sehingga harapan masyarakat kegiatan ini bermanfaat untuk Pembangunan di Desa Hangalande.

3. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kegiatan bersama masyarakat dan aparatur BUMDes, adapun hasil yang dapat diimplementasikan meliputi:

a. Pendataan BUMDes

Data BUMDes terdaftar pada aplikasi adalah BUMDes identitas yang meliputi nama, alamat, peraturan desa sebagai dasar hukum untuk pendirian, AD/ART, Standard Operating Procedure (SOP), laporan keuangan terakhir, alamat email, media sosial digunakan, nama admin, dan unit bisnis. Kebijakan yang telah ditetapkan perlu dikomunikasikan.

b. Sumber Daya (Staf)

Dari hasil wawancara aparatur BUMDes tersebut diketahui bahwasanya masih rendahnya kualitas kompetensi masing-masing aparatur pengelolanya. Rata-rata jumlah aparatur pelaksana kegiatan BUMDes hanya berlatar belakang pendidikan SLTA. Hal ini berakibat pada rendahnya ilmu pengetahuan mengenai pengetahuan tentang pemerintahan. Hal ini akan berpengaruh pada tidak maksimalnya kinerja pegawai sehingga mengakibatkan kinerja mereka belum mampu dalam upaya meningkatkan usaha BUMDes tersebut.



Gambar 1. Pengurus dan Pengelola BUMDes

c. Sikap Pelaksana (Disposisi)

Disposisi/sikap implementor memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan publik. Tingkah laku atau sikap aparatur pelaksana menjadi salah satu penunjang efektifnya implementasi. Dalam disposisi ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengangkatan birokrat dan insentif.

1) Pengangkatan Birokrat

Pengangkatan birokrasi harus didasarkan kepada nilai-nilai kompetensi, integritas dan loyalitas. Dalam pengangkatan pengurus BUMDes diputuskan oleh kepala desa dengan peraturan yang ada. Peraturan tersebut dapat dilihat di lampiran belakang laporan akhir.

2) Insentif

Salah satu pendorong kinerja adalah dengan pemberian insentif agar para pelaksana memiliki motivasi dan semangat kerja yang besar. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi serta aparatur bumdes menjelaskan bahwa insentif yang diberikan kepada pengurus BUMDes ketentuan tunjangan kesejahteraan pengelola operasional hanya diatur di dalam AD/ART tidak ada peraturan pemerintah yang mengharuskan persentase tertentu. Insentif tersebut diharapkan pelaksana atau pengelola BUMDes mampu memaksimalkan kinerja kerjanya sehingga mampu mencapai tujuan meningkatkan untuk perekonomian masyarakat di desa.

d. Struktur Birokrasi

Secara umum birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Bentuk organisasi dipilih sebagai suatu kesepakatan kolektif untuk memecahkan berbagai masalah. Struktur organisasi-organisasi pelaksana kebijakan mempunyai pengaruh penting dalam implementasi kebijakan. Terdapat dua hal penting dalam struktur organisasi yaitu:

- a. Pertama, prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) yang berasal dari dalam (internal) organisasi.
- b. Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi yang berasal dari luar (eksternal) organisasi. Untuk kesuksesan suatu kebijakan memerlukan koordinasi diantara organisasi yang terlibat, akan tetapi sering masing-masing organisasi memerlukan eksistensi sendiri (ego sektoral) sehingga

menyulitkan pelaksanaan koordinasi.

Berdasarkan teori tersebut untuk mengoptimalkan pelaksanaan BUMDes, maka pengelola aparatur BUMDes mempunyai tugas dan peran yang dijalankan meliputi factor pendukung dan penghambat:

Faktor Pendukung

a. Komitmen Pemerintah

Komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan BUMDes dibuktikan dengan pemberian dana usaha mengembangkan BUMDes. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyebutkan bahwa peran pemerintah bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan desa melalui BUMDes sangat tinggi. Selain suntikan dana dari pemerintah pada tahun 2022 juga memberikan fasilitas pendukung untuk pengelolaan BUMDes

b. Tersedianya Potensi Sumber Daya Alam

Desa saat ini sudah diberikan kebebasan untuk mengatur wilayah, ekonomi dan masyarakatnya sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Saat ini desa diberikannya kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, desa juga sudah dapat mengembangkan perekonomiannya sendiri. Ada banyak cara untuk mengembangkan ekonomi desa, salah satunya adalah melalui pemanfaatan aset desa sebagai potensi desa. Desa memiliki aset-aset asli desa yang dapat berbentuk tanah, kolam, sumber mata air ataupun sumber daya alam lainnya.

Faktor Penghambat

a. Tidak Didukung Anggaran Yang Memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi bahwa BUMDes sudah cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat, itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDes itu sendiri. Pada modal utama BUMDes saat ini ialah dana prioritas ADD desa yang dana tersebut tidak selalu berfokus pada kegiatan BUMDes akan tetapi keperluan infrastruktur desa.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Belum Optimal

Keterlibatan masyarakat dalam program BUMDes memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha. Berdasarkan wawancara mendalam dengan Kabid Ekonomi menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat terhadap BUMDes sangat terbuka, namun kendala di masyarakat masih rendah pada tingkat SDM sebagai pengelola. Salah satu usaha ialah unit simpan pinjam karena itu perlu adanya inovasi usaha baik dari pengelola maupun masyarakat desa dalam mengembangkan ekonomi desa.

Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Digitalisasi BUMDes yaitu:

a. Memberikan sosialisasi tentang unit usaha apa yang dapat dikembangkan oleh desa, dengan sosialisasi bersama kepada pengelola BUMDes serta masyarakat setempat, usaha-usaha yang dapat meningkatkan ekonomin

perdesaan untuk dapat tertarik pihak swasta berkolaborasi.

- b. Merekrut dan memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes dalam pengembangan usaha ekonomi desa.
- c. Menambah anggaran untuk kedepannya. Untuk meningkatkan agar pelaksanaan digitalisasi, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk keperluan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat mendukung berjalannya program digitalisasi BUMDes.

Hasil diskusi dan temuan dilokasi kegiatan yang berkaitan dengan Program digitalisasi BUMDes di Desa Hangalade, penulis menemukan bahwa dalam dua ruang lingkup yaitu pada ruang lingkup teknologi tepat guna sudah terlaksana cukup baik dapat membantu dalam pelaksanaan unit-unit usaha BUMDes-BUMDes. Misalnya pada penggunaan media komputer dalam pelaksanaan administrasi-administrasi yang dilakukan aparatur BUMDes serta teknologi bantu dalam hasil usahanya berupa traktor pada bidang pertanian dan lainnya. Kedua pada ruang lingkup teknologi informasi belum terlaksana sehingga masih bersifat konvensional pada distribusi hasil usaha BUMDes tersebut.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan program digitalisasi BUMDes pada ruang lingkup teknologi tepat guna telah terlaksana cukup baik dapat membantu administrasi-administrasi BUMDes serta unit hasil usaha yang dihasilkan. Pada program digitalisasi BUMDes ada faktor pendukung serta faktor penghambat. Faktor pendukung ada dua yaitu adanya komitmen pemerintah dan tersedianya potensi sumber daya alam. Faktor penghambat 3 indikator yaitu tidak didukung anggaran yang memadai, sumber daya pengelola belum optimal dan terbatasnya kolaborasi dari pihak swasta. Upaya dari Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa ialah memberikan sosialisasi tentang unit usaha yang tepat, merekrut dan memberikan pelatihan dan menambah anggaran untuk BUMDes-BUMDes tersebut. Guna meningkatkan digitalisasi BUMDes disarankan kepada pemerintah desa berupaya memberikan anggaran lebih dalam kegiatan digitalisasi BUMDes serta kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa memberikan pembinaan dan sosialisasi inovasi kegiatan unit usaha.

Referensi

- Bafa, Hermina. Erawati, Teguh. Priwastiwi, A. (2021). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa di Desa Wunlah Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 13(April), 15–38.
- Fakhriyyah, S., Adhawati, S. S., Cangara, A. S., Fachry, M. E., & Hasanuddin, U. (2021). Pelatihan Buku Kas Digital Pada Unit Usaha. *Resona*, 6(1), 73–80.
- Fardani, I., Rochman, G. P., Akliyah, L. S., & Burhanuddin, H. (2022). Digitalisasi Desa Di Desa Cikole Lembang. *RESONA : Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 181. <https://doi.org/10.35906/resona.v5i2.806>
- H.R. Zulki Zulkifli Noor. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif 2015.pdf. *Deepublish*, 113.
- Hayyuna, R., Pratiwi, R. N., Mindarti, L. I., Publik, J. A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2005). Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDes di Desa Sekapuk , Kecamatan Ujungpangkah , Kabupaten Gresik). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(72), 1–5.
- M. Agung Alfarizi. (2020). Implementasi Digitalisasi badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara (studi kasus BUMDes Buluh Mandiri). 1–15.
- Moleong. 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Ovami, D. C., Nasution, M. D., Siregar, H., & ... (2022). Strategi Mewujudkan Desa Inovasi Melalui Pengembangan Potensi Desa. *Amaliah ...*, 6(1), 1–4. <https://www.jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/1227>
- Rahman, R. (2021). Implementasi Digitalisasi BumDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. *Jurnal Abdimas*, 1(1), 1–12.
- Rivaldi, A. (2021). Optimalisasi Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 241–251. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.36>
- Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen pada BUMDES dalam the Role of Management System in Bumdes in Increasing the Real Income of the Village. *Kumawula Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Unpad*, 2(1), 23–40.
- Tini, D. L. R., & Yulastina, R. (2021).

Pelatihan Dan Pendampingan Pengelolaan Administasi Bumdes Di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)*, 2(1), 66–76. <https://doi.org/10.22219/janayu.v2i1.13044>

Wardana, W., Fitrianna, H., & Suhartanto, S. (2022). Scale Up Business dan Digitalisasi Tata Kelola BUMDes Retno Sembodo dalam Membentuk Kemandirian Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Undikma*, 3(2), 178. <https://doi.org/10.33394/jpu.v3i2.5692>